

CASCADING
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026

TUJUAN : Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan
SASARAN : Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- ind:
- a. Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa
 - b. Persentase peningkatan temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI atas LKPD
 - c. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan
 - d. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- ind: a. persentase desa berisiko tinggi
b. persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B
c. level kapabilitas APIP

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

- ind: a. persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko
b. jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti
c. jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti

KEGIATAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

- ind:
- a. persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi
 - b. persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori

KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- ind:
- a. Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi
 - b. persentase pemerintah desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi

KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

- ind:
- a. level komponen aktivitas dan kualitas pengawasan
 - b. level komponen dukungan pengawasan

PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	REVIU LAPORAN KINERJA	REVIU LAPORAN KEUANGAN	PENGAWASAN DESA	KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP (indk b dan c)
ind: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	ind: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	ind: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	ind: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	ind: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	ind: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	ind: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (INDK A)	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (ind b)
ind: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	ind: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS
ind: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	ind: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	ind: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	ind: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN (indk a)	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN (indk b)
ind: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	ind: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun